

## PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH DALAM RAHN BERDASARKAN PSAK NO. 107 DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG HASANUDDIN

Mutmainnah Yusuf

([mutmainnah@gmail.com](mailto:mutmainnah@gmail.com))

Muchran BI

([muchran@unismuh.ac.id](mailto:muchran@unismuh.ac.id))

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

[andiawingsriani@gmail.com](mailto:andiawingsriani@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to determine the accounting treatment and financing of ijarah at PT Pegadaian Syariah Hasanuddin Branch. Analyzing the suitability of ijarah accounting treatment with PSAK 107. Analyzing ijarah financing with conformity to the National Sharia Council Fatwa No: 25 / DSN-MUI / III / 2002. The method used in the research is qualitative descriptive method. By conducting interviews with PT. The Hasanuddin Branch Pawnshop or by taking written data is then analyzed and compared between the real conditions that occur in the field into writing with the conformity of PSAK 107 and the fatwa of the national sharia council. The results of this study reveal that accounting treatment related to the recognition and measurement carried out by PT. Sharia Pegadaian Hasanuddin Branch is in accordance with PSAK 107, but related to the presentation and disclosure of PT. Sharia Pegadaian Hasanuddin Branch does not present and disclose financial statements specifically. Then the cost of ijarah (Mu'nah Pemamanan) applied by PT. Sharia Pawnshop Hasanuddin Branch is not in accordance with the National Sharia Council Fatwa No: 25 / DSN-MUI / III / 2002 where the amount of ijarah fees is not determined by the size of the loan. This is due to PT. The Hasanuddin Branch Pawnshop Unit in determining ijarah fees is based on the classification of marhun bih.*

**Keywords:** *Ijarah Accounting Treatment, PSAK No.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan pembiayaan *ijarah* di PT Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi *ijarah* dengan PSAK 107. Menganalisis pembiayaan *ijarah* dengan kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan melakukan wawancara pada pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin atau dengan mengambil data tertulis kemudian dianalisis dan membandingkan antara keadaan nyata yang terjadi di lapangan kedalam tulisan dengan kesesuaian PSAK 107 dan fatwa dewan syariah nasional. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sudah sesuai dengan PSAK 107, namun terkait dengan penyajian dan pengungkapan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak menyajikan dan mengungkapkan ke dalam laporan keuangan secara khusus. Kemudian biaya *ijarah* (*Mu'nah Pemeliharaan*) yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 dimana besar biaya *ijarah* tidak ditentukan oleh besarnya pinjaman. Hal ini disebabkan PT. Unit Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin dalam penentuan biaya *ijarah* berdasarkan dengan penggolongan *marhun bih*.

**Kata Kunci :** *Perlakuan Akuntansi Ijarah, PSAK No.*

## 1. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Indonesia terdapat dua pembiayaan yaitu pembiayaan konvensional dan pembiayaan syaria'ah. Namun, kebanyakan masyarakat saat ini lebih memilih pembiayaan syaria'ah dikarenakan pembiayaan konvensional melakukan proses transaksi dengan system riba yaitu mengambil keuntungan dengan mengenakan riba disetiap transaksi. Salah satu pembiayaan syaria'ah di Indonesia adalah pegadaian syaria'ah. Pegadaian syaria'ah merupakan salah satu lembaga keuangan syaria'ah di Indonesia yang menyalurkan dana kepada masyarakat kelas menengah kebawah, dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga, jika kita menggadaikan barang di pegadaian syaria'ah (Rahn) ada dua Akad yaitu : akad ijarah dan akad rahn, keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena akad ini sangat berkaitan satu sama lain.

Mekanisme operasional gadai syaria'ah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyera hkan barang bergerak dan

kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya biaya yaitu biaya ijarah. Biaya ijarah meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah tetapi biaya tersebut tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman, sebagaimana ketentuan Dewan Syariah Nasional dan Majelis ulama Indonesia pada tanggal 26 juni 2002, yang mana DSN dan MUI mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Pada penerapan system syaria'ah, tentu mempunyai system perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya, dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pada biaya ijarah dalam gadai syaria'ah harus sesuai dengan PSAK NO. 107 tentang ijarah

dan ketentuan ketentuan syari'ah yang sudah diatur. Penelitian diatas merupakan salah satu contoh bahwa di Indonesia terdapat lembaga pembiayaan syari'ah yang belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya dimana lembaga pembiayaan syari'ah harus menjalankan prinsip prinsip syari'ah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan dari penelitian diatas juga menunjukkan bahwa PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Asri Madani Nusantara belum menerapkan PSAK NO. 107 Tentang ijarah. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan PSAK NO 107 di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin*”

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan objek dan subjek yang diteliti sesuai dengan fakta yang ada pada tempat penelitian dengan tujuan agar dapat

menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti dengan tepat. Hal ini untuk memahami fenomena yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Penyajian dan Pengungkapan

Dalam penyajian dan pengungkapan atas setiap transaksi laporan keuangan PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak terdapat catatan akuntansi yang khusus karena semua transaksi tercatat langsung oleh kantor pusat itu dikarenakan sistem yang dipakai saat ini berbasis online. Dalam Laporan Keuangan Poisisi Keuangan Konsolidasian PT. Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak Per Triwulan 1 Tahun 2018, didalam laporan keuangan tersebut pihak Pegadaian syariah piutang diakui sebagai asset lancer yakni dengan akun pinjaman yang diberikan (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per period terkait). Sedangkan pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai pendapatan usaha.

## **b. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah**

Analisis didasarkan dari hasil penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin dengan membandingkan kesesuaian antara PSAK 107 yang berisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait dengan ijarah, berikut ini adalah analisisnya :

### **1. Pengakuan dan Pengukuran**

Setelah nasabah mendapatkan uang pinjaman dari transaksi rahn maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui pinjaman tersebut sebagai piutang oleh karena itu timbul biaya biaya yang dibebankan kepada nasabah seperti biaya administrasi (mu'nah akad) dan biaya ijarah (mu'nah pemeliharaan) yang diakui sebagai biaya sewa atas jasa menyimpan dan memelihara marhun, tentu tarif jasanya akan berbeda setiap transaksi tergantung besar pinjaman nasabah sesuai penggolongan marhun bih.

a. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui pinjaman yang diberikan kepada nasabah sebagai piutang melakukan akad antara kedua belah pihak dibuktikan dengan penandatanganan oleh nasabah

pada Surat Bukti Rahn (SBR), berdasarkan PSAK 107 paragraph 20 bahwa utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.

b. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui pendapatan sewa (ijarah) sebagai pendapatan sewa ijarah ketika nasabah telah melakukan transaksi akad ijarah. Sedangkan pada PSAK 107 pada paragraph 9 yaitu objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan, kemudian pada paragraph 14 yaitu pendapatan sewa diukur pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa.

c. Pengukuran atas *biaya ijarah* diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

### **2. Penyajian dan Pengungkapan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin bahwa penyajian dan pengungkapan tidak dicatat di pegadaian syariah cabang hasanuddin dan tidak disajikan secara khusus melainkan

semuanya disajikan pada catatan atas laporan keuangan dari kantor pusat. Berikut ini adalah isi dari laporan keuangannya :

a. Laporan posisi keuangan konsolidasian

b. Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

c. Laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

d. Laporan arus kas konsolidasian.

e. Catatan atas laporan keuangan.

**Tabel 4.6**

**PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH DALAM RAHN  
 DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG HASANUDDIN DENGAN PSAK 107.**

No.	Jenis Transaksi	PSAK No. 107	CPS Hasanuddin
1.	Memberi uang pinjaman.	Piutang (D) Kas (K)	Marhun bih (D) Kas (K)
2	Penerimaan sewa dari nasabah.	Kas (D) Pendapatan sewa (K)	Kas (D) Pendapatan (K)
3	Pembebanan beban perbaikan.	B. perbaikan asset ijarah (D) Kas (K)	Tidak dijurnal
4	Pelunasan uang pinjaman	Kas (D) Piutang (K)	Kas (D) Marhun bih (k)
5	Penjualan pada masa akad berakhir	Kas (D) Pendapatan (K)	Dana sosial (D) Uang kelebihan kadaluarsa (K)

Sumber : Data diolah tahun 2018

Berdasarkan dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada pegadaian syariah cabang hasanuddin mengenai biaya telah sesuai dengan PSAK 107 dimana uang pinjaman dan biaya ijarah diakui pada saat pertama melakukan transaksi rahn, serta *pengukuran atas biaya ijarah* diukur

sebesar nilai taksiran barang jaminan. Sedangkan penyajian dan pengungkapan pada pegadaian syariah cabang hasanuddin belum sesuai dengan PSAK 107 karena pihak pegadaian syariah tidak mempunyai laporan keuangan khusus seperti yang di atur dalam PSAK 107.

#### 4. PENUTUP

##### a. Kesimpulan

1. Penentuan biaya ijarah yang diterapkan oleh unit pegadaian syariah cabang hasanuddin secara garis besar sudah sesuai dengan fatwa MUI yang dihitung per 10 hari. Adapun dengan penentuan biaya ijarah (*mu'nah pemeliharaan*) yang dikenakan pada nasabah tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh fatwa Dewan syariah nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 dimana fatwa tersebut menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, namun prakteknya di pegadaian syariah cabang hasanuddin dalam penentuan tarif biaya ijarah (*mu'nah pemeliharaan*) berdasarkan dengan penggolongan pinjaman (marhun bih).
2. Pemberian diskon biaya ijarah (Mu'nah pemeliharaan) dan biaya administrasi (Mu'nah akad) tergantung dengan penggolongan marhun bih dan nilai taksiran dari barang tersebut.
3. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui sebagai

piutang pinjaman yang dicairkan kepada nasabah serta mengakui biaya ijarah (Mu'nah Pemeliharaan) sebagai pendapatan ijarah dan mengakui biaya

##### b. Saran

1. Sebaiknya PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin membuat laporan keuangan secara khusus.
2. Tarif diskon ijarah (Mu'nah Pemeliharaan) sebaiknya diberitahukan oleh pihak pegadaian syariah cabang hasanuddin kepada nasabah dengan perhitungan yang rinci sehingga nasabah mengetahui adanya diskon yang diterapkan oleh pegadaian syariah cabang hasanuddin.
3. Dalam surat bukti rahn (SBR) di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin hendaknya ditukis jelas antara tarif ijarah dan diskon ijarah
4. Selain biaya ijarah (Mu'nah pemeliharaan) dan biaya administrasi (Mu'nah Akad) hendaknya PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin membuat aturan biaya perbaikan atau pemeliharaan obyek ijarah guna mengantisipasi adanya kerusakan marhun.

5. Sebaiknya uang kelebihan lelang milik nasabah dapat diambil sewaktu waktu oleh nasabah tanpa adanya batasan waktu pengambilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Arista Insaning. 2014. *Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT.BPR Syariah Asri Madani Nusantara*. Universitas Jember.
- Bukido, Rosdalina dan Faradilla Hasan. 2016. *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol.14 No.1.
- Hasan, Faradilla, et al. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol.14 No. 2.
- Isini, Adistya dan Herman Karamoy. 2017. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah Rahn Pada PT. Pegadaian Persero Cabang Manado*. *Jurnal Emba*. Vol.5 No.2, Halaman 235-244.
- Ismaulina, dan Eka prasetia. 2016. *Perlakuan Akuntansi Ijarah Pada Pembiayaan Qardh Beragun Emas Rahn Di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe*. *Jurnal Sarwah*. Vol.15 No.2.
- Mariyanti, Oktaviani dan Nur Anisah. 2015. *Perlakuan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan Psak 107 Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang*. *Jurnal stiedewantara*. Vol.X No. 2.
- Putri, Ira Ikasa. 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah Rahn Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Pontianak*. *Jurnal Audit Dan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*. Vol.2 No.2, Halaman 1-20.
- PT. Pegadaian (Persero) Tbk . 2009. *Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian*, Jakarta
- PT. Pegadaian (persero) Tbk dan Entitas Anak 2018, *Laporan keuangan konsolidasian Triwulan I*, Jakarta
- Rahardjo, Soeko Tribekti. 2016. *Perjanjian Pembiayaan Ijarah Di Lingkungan Bank Syariah*. *Jurnal Al-Qanun*. Vol.19, No.1
- Sari, Ayu Ramadani dan Muhammad Arfan. 2017. *Analisis Gadai Emas Berdasarkan Psak 107 Studi kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 2 No. 3
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta
- Syairi, Moh. 2015. *Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Di PT. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.